

TERBATAS

MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT
DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI



PETUNJUK TEKNIK
NOMOR : JUKNIK / 4661 / VI / 2009

Tentang

**PELAYANAN PEMBUATAN PETA LAUT
DI DISHIDROS DENGAN PIHAK KE III**

JAKARTA, 28 JULI 2009

TERBATAS

TERBATAS

MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT
DINAS HIDRO – OSEANOGRAFI

PETUNJUK TEKNIK

Nomor: Juknik / 4661 / VI / 2009

Tentang

PELAYANAN PEMBUATAN PETA LAUT DI DISHIDROS DENGAN PIHAK III

BAB – I

PENDAHULUAN

1. Umum

Dishidros sebagai lembaga hidrografi nasional mempunyai fungsi tugas dan tanggung jawab tersedianya seluruh peta laut Indonesia yang akurat dan *up to date* serta memiliki ketelitian yang memenuhi syarat sesuai dengan standard *Internasional Hydrography Organisation (IHO)*. Dalam pembuatan peta kertas, publikasi standar yang digunakan adalah M-4, sedang untuk ENC, publikasi standar yang digunakan adalah S-57. Kenyataan dilapangan bahwa perairan di Indonesia seluas 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia sehingga Implikasinya jumlah nomor peta laut Indonesia sampai saat ini sudah mencapai 500 lebih. Ini merupakan suatu tantangan bagi Dishidros dalam mewujudkan tugas pokoknya yaitu tersedianya seluruh peta laut yang akurat dan *up-to-date*.

Sebagai badan pelaksana pusat tingkat Mabasal disamping Dishidros harus mampu menyediakan peta navigasi untuk kepentingan umum juga harus mampu menyediakan peta militer, dimana sebagian

TERBATAS

TERBATAS

besar anggaran yang berasal dari pemerintah mengarah untuk kepentingan militer. Sedang dalam memenuhi kepentingan umum Dishidros mengambil kebijakan dengan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah terkait dan kerjasama dengan pihak ke III, yaitu satu sisi keamanan dan keselamatan pelayaran tetap terjaga disisi yang lain fasilitas yang ada di laut juga aman dari aktivitas pelayaran.

Dengan telah keluarnya Peraturan Pemerintah tentang pembiayaan pembuatan peta laut, maka dalam pelaksanaannya perlu adanya suatu acuan teknis dalam bentuk Buku Petunjuk Teknis sementara yang mengatur bagaimana pembuatan peta laut dapat dilaksanakan dengan baik sebelum adanya juklak yang resmi ada. Buku ini akan memberikan gambaran bagaimana pelayanan pembuatan peta laut oleh Dishidros, agar tidak terjadi simpang siur informasi mulai dari teknis, pembiayaan serta kewenangan dalam pembuatan peta laut khususnya di lingkungan Dishidros.

2. Maksud dan tujuan.

- a. Maksud dari pembuatan petunjuk teknik ini adalah untuk dapat digunakan sebagai pedoman sementara bagi Dishidros dalam memberikan pelayanan pembuatan peta laut yang berasal dari anggaran pihak ke III.
- b. Tujuan dari petunjuk teknik ini adalah untuk dapat dilaksanakannya proses pelayanan pembuatan peta laut secara proporsional dan akuntabel dalam rangka menjaga kualitas peta laut produk Dishidros secara berkesinambungan dengan prosedur yang betul.

3. Ruang lingkup.

Ruang lingkup penulisan petunjuk teknik ini adalah meliputi pembuatan peta laut dengan pihak ke III, kewenangan dan rincian pembiayaan serta petunjuk tambahan (hal-hal yang perlu diperhatikan).

TERBATAS

4. Sistimatika

Petunjuk teknik ini disusun berdasarkan kebutuhan bagaimana pembuatan peta laut khususnya apabila ada kerjasama dengan pihak ke III, dengan sistimatika sebagai berikut :

- a. BAB - I : PENDAHULUAN**
- b. BAB - II : PEMBUATAN PETA LAUT DGN PIHAK KE III**
- e. BAB - III : PENUTUP**

TERBATAS

TERBATAS

BAB - II

PEMBUATAN PETA LAUT DENGAN PIHAK KE III

5. Kegiatan Pembuatan Peta Laut

Pembuatan peta laut ataupun revisi peta laut dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak ke III. Dalam pelaksanaan pembuatan peta laut tersebut, pihak ke III dapat mengajukan permintaan pembuatan peta laut kepada Dishidros antara lain melalui dengan :

a. Survei Lengkap

Apabila pihak ke III akan membuat peta laut dengan melaksanakan kegiatan survei hidro-oseanografi maka Dishidros dengan perkuatannya akan melaksanakan survei yang meliputi : kegiatan hidrografi, oseanografi, meteorologi dan geografi maritim. Data hasil survei tersebut dapat dipergunakan untuk pembuatan peta laut dengan anggaran berasal dari pihak ke III yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama antara Dishidros dengan pihak ke III termasuk biaya yang dibutuhkan.

b. Supervisi

Apabila pihak ke III melaksanakan kegiatan survei hidro-oseanografi sendiri yang produk akhirnya adalah peta laut maka harus melibatkan *Technical Officer* dari Dishidros sebagai supervisi teknis. Supervisi teknis ini bertujuan agar dalam metodologi pengambilan data dan pengolahan data serta hasil survei memenuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh IHO untuk kepentingan pemetaan laut. Data hasil survei tersebut diserahkan kepada Dishidros melalui supervisi tersebut.

TERBATAS

c. **Field Check Survei**

Dalam hal dermaga atau pelabuhan atau area milik pihak ke III yang telah dipetakan oleh Dishidros namun dijumpai banyak penambahan obyek fisik di pantai atau hasil pembangunan konstruksi pantai dan lepas pantai, maka diperlukan kegiatan *field check*. Lingkup kegiatan *field check* meliputi kegiatan pengecekan lapangan dimana akan dilaksanakan pengecekan posisi suatu bangunan fisik pelabuhan, instalasi, kabel laut, pipa bawah air, SBNP dan data-data lain untuk kepentingan revisi peta laut atas permintaan pihak ke III. Apabila kedalaman laut di area tersebut di tengarai telah banyak mengalami perubahan, maka dapat dilaksanakan pengecekan kedalaman pada lokasi-lokasi yang dipilih.

d. **Field Check Peta**

Apabila dalam verifikasi data hasil survei yang telah dilaksanakan oleh pihak ke III yang akan digambarkan dalam peta laut terdapat permasalahan teknis seperti perubahan datum, proyeksi, pergeseran obyek – obyek yang nantinya berpengaruh besar terhadap para pengguna peta laut, maka perlu dilaksanakan upaya penelitian atas peta tersebut, yang dapat diikuti dengan pengecekan lapangan untuk menentukan ulang posisi-posisi obyek yang ada tanpa melaksanakan pengecekan kedalaman.

6. **Tahapan Pembuatan Peta Laut**

Tahapan pembuatan peta laut yang dilaksanakan di Dishidros melalui tahapan survei / *field check* dan tahapan pembuatan peta / kartografi, adapun rinciannya sebagai berikut :

a. **Kegiatan Lapangan**

1) **Perencanaan**

- 2) Persiapan
- 3) Pelaksanaan

b. Kartografi

- 1). Desain Peta
- 2). Verifikasi dan Kompilasi
- 3) Editing
- 4) Koreksi
- 5). Komposit
- 6) Repromat

7. Kewenangan

Proses pembuatan peta laut yang bekerjasama dengan pihak ke III dilaksanakan dengan cara survei lengkap, *rechecking survey* atau supervisi, dan melibatkan seluruh bagian di Dishidros, maka sebagai penanggung jawab administrasi maupun operasional adalah Subdissurvei. Apabila pihak ke III akan melaksanakan kegiatan pemetaan laut maka surat permohonan kepada Kadishidros U.p Kasubdissurvei yang akan menindaklanjuti surat permohonan tersebut. Sedangkan proses pembuatan peta laut dengan melaksanakan *field check* peta, maka sebagai penanggung jawab administrasi dan operasional adalah Subdispeta dimana pihak ke III membuat surat permohonan kepada Kadishidros U.p Kasubdispeta.

8. Anggaran

Proses pembiayaan dalam pembuatan peta laut ini terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan survey / *field check* dan pembiayaan proses kartografi.

a. Survei / Field Check

Seperti telah kita ketahui bahwa dalam setiap kegiatan survei / *field check* membutuhkan anggaran tersendiri, hal ini akan tertuang dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan pihak ke III secara rinci dan dengan besaran sesuai volume pekerjaan di lapangan.

b. Proses Kartografi

Adapun proses kartografi sudah ada ketentuan yang mengikat yaitu berdasarkan surat Edaran dari Departemen Pertahanan dengan Nomor : SE / 21 / VI / 2009, biaya pembuatan peta laut sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume			Index(Rp)	Jumlah (Rp)
		Jml	Satuan	Hari		
1.	Material Kartografi	1	Nmr	-	15.000.000,-	15.000.000,-
2.	Material Cetak	1	Nmr	-	24.000.000,-	24.000.000,-
3.	Kartografer					
	a. Perencanaan	2	Org	5	275.000,-	2.750.000,-
	b. Kompilasi	4	Org	10	275.000,-	11.000.000,-
	c. Editing	4	Org	10	275.000,-	11.000.000,-
	d. Koreksi	2	Org	5	275.000,-	2.750.000,-
4.	Uang Makan	12	Org	30	25.000,-	2.500.000,-
5.	Harwat	1	Paket	-	1.000.000,-	1.000.000,-
Total						70.000.000,-

Seluruh kegiatan lapangan dan proses kartografi dibebankan kepada pihak ke III atas kesepakatan bersama antara Dishidros dengan pihak ke III, dengan mengedepankan azas kepentingan umum. Hal ini sebagai wujud salah satu fungsi Dishidros sebagai *public service* dalam hal penyediaan peta navigasi di seluruh perairan Indonesia yang akurat dan *up to date*.

TERBATAS

BAB – III PENUTUP

Demikian petunjuk teknik ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelayanan pembuatan peta laut sementara di Dishidros TNI AL dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dishidros sebelum petunjuk teknis yang resmi dikeluarkan.

Jakarta, 28 Juli 2009

Kepala Dishidros



Sugeng Supriyanto
Laksamana Pertama TNI

TERBATAS

2

SURAT EDARAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR SE/21/VI/2009
TANGGAL 10 Juni 2009

5. Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada butir 4 dibebankan kepada wajib bayar.
6. Pemberlakuan Jenis dan Tarif tersebut butir 2, akan berakhir setelah Peraturan Pemerintah yang dimaksud ditetapkan.
7. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepada Yth :

Kasal.

Tembusan :

1. Menteri Pertahanan
2. Panglima TNI
3. Kasad, Kasau
4. Irjen Dephan
5. Dirjen Strahan Dephan
6. Dirjen Renhan Dephan
7. Kadishidros TNI AL.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
MENTERI PERTAHANAN
NOMOR **SE/21/VI/2009**
TANGGAL **10 Juni 2009**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JASA SURVEI DAN PEMETAAN
DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI**

NO	JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp.)
	2	3	4
I.	JASA PRODUK HASIL SURVEI DAN PEMETAAN		
1.	Peta Laut Digital (<i>hardcopy</i>)	per lembar	175.000
2.	Peta Navigasi Elektronik (<i>ENC</i>)	per cell	72.000
3.	Buku-buku Nautik		
a.	Daftar Pasang Surut Kepulauan Indonesia	per buku	90.000
b.	Daftar Arus Pasang Surut Kepulauan Indonesia	per buku	60.000
c.	Almaka Nautika	per buku	110.000
d.	Berita Pelaut Indonesia (BPI, per tahun, 52 nomor, + 2 nomor petunjuk indeks)	per buku	200.000
e.	Katalog Peta Laut dan Buku Nautik Indonesia	per buku	150.000
f.	Kepanduan Bahari Indonesia Jilid-I	per buku	200.000
g.	Kepanduan Bahari Indonesia Jilid-II	per buku	200.000
h.	Kepanduan Bahari Indonesia Jilid-III	per buku	170.000
i.	Kepanduan Bahari Indonesia Jilid-IV	per buku	170.000
j.	Daftar Ilmu Pelayaran	per buku	170.000
k.	Daerah Ranjau Perairan Indonesia	per buku	100.000
l.	Informasi Pelabuhan Indonesia	per buku	135.000
m.	Daftar Suar Indonesia	per buku	170.000
n.	Daftar Pelampung Indonesia	per buku	50.000
o.	Sistem Pelampung "A"	per buku	50.000
p.	Peta Cuaca Perairan Indonesia	per buku	400.000
q.	Peta Arus Kawasan Indonesia Barat/Timur	per buku	400.000
r.	Data Cuaca Perairan Indonesia	per buku	200.000
s.	Daftar Stasiun Radio Pantai	per buku	110.000
t.	Daftar Nama Pulau-Pulau Kepulauan Indonesia	per buku	170.000
u.	Daftar Kerangka Kapal	per buku	135.000
v.	Daftar Track dan Jarak antar Pelabuhan Indonesia	per buku	170.000
w.	Buku Kabel dan Pipa Bawah Laut	per buku	170.000
x.	Daftar Terbit Terbenam Matahari	per buku	135.000

1	2	3	4
II.	JASA SURVEI DAN PEMETAAN		
1.	Survei GPS Geodetik	per titik	3.500.000
2.	Pengolahan Data Survei GPS Geodetik	per titik	250.000
3.	Survei Sipat Datar (Leveling)	per km	2.500.000
4.	Pengolahan Data Survei Sipat Datar	per km	250.000
5.	Survei Pasut (Minimum 15 hari)	per titik	10.000.000
6.	Pengolahan Data Survei Pasut	per titik	1.000.000
7.	Paket Survei Hidros untuk Keselamatan Navigasi (Minimum 30 hari)	per tim per hari	9.000.000
8.	Paket Survei Hidros untuk Rekayasa (Engineering) (Minimum 15 hari)	per tim per hari	15.000.000
9.	Kapal Survei kelas Lepas Pantai (KLAS DKB)	per hari	50.000.000
10.	Kapal Survei kelas Lepas Pantai (KLAS LSR)	per hari	110.000.000
11.	Kapal Survei kelas Pantai (KLAS CONDOR)	per hari	70.000.000
12.	Kapal Survei Latih (KLAS VEGA)	per hari	20.000.000
13.	Paket Pembuatan Peta Laut	per nomor per paket (1000 lbr)	70.000.000
III.	JASA PELATIHAN		
1.	Survei Hidrografi Cat-A IHO (5 bulan)	per orang	51.850.000
2.	Survei Hidrografi Cat-B IHO (6 bulan)	per orang	51.100.000
3.	Survei Hidrografi Cat-C IHO (5 bulan)	per orang	40.850.000
4.	Paket Pulta Hidros (10 hari)	per orang	3.500.000
5.	Paket Lahta Hidros (10 hari)	per orang	3.500.000
6.	Paket Kartografi (10 hari)	per orang	3.500.000
7.	Paket ENC dan ECDIS (10 hari)	per orang	2.500.000
IV.	JASA SEWA PERALATAN SURTA		
1.	GPS Geodetik	per hari	600.000
2.	Handheld GPS	per hari	50.000
3.	DGPS Long-range	per hari	1.250.000
4.	DGPS Medium-range	per hari	1.000.000
5.	DGPS Short-range	per hari	750.000
6.	World-Wide DGPS	per hari	400.000
7.	Single-Beam Echosounder	per hari	300.000
8.	Multi-Beam Echosounder	per hari	2.500.000
9.	Side Scan Sonar	per hari	1.000.000
10.	Sub-bottom Profiler	per hari	1.000.000

LAMPIRAN SURAT EDARAN
 MENTERI PERTAHANAN
 NOMOR 56/21/VII/2009
 TANGGAL 10 Juni 2009

1	2	3	4
11	Magnetometer	per hari	400.000
12	Currentmeter	per hari	250.000
13	ADCP	per hari	300.000
14	CTD-meter	per hari	250.000
15	Tide and Wave Recorder	per hari	250.000
16	Automatic Tide Gauge	per hari	100.000
17	Automatic Weather Station	per hari	400.000
18	Sunshine Recorder	per hari	50.000
19	Meteograph	per hari	50.000
20	Baro/Hydrograph	per hari	50.000
21	Barometer Aneroid	per hari	50.000
22	Automatic Data Logging	per hari	300.000
23	Genset	per hari	50.000
24	Alat Komunikasi	per hari	50.000
V.	JASA PENIMBALAN PERALATAN NAUTIKA		
	Penimbangan Kompas Magnet	per unit	500.000
VI.	JASA PENCETAKAN		
1	Pencetakan buku kuarto hitam putih, setebal 100 halaman, dengan paket :		
	a. 250 buku	per paket	5.000.000
	b. 500 buku	per paket	7.500.000
	c. 1000 buku	per paket	14.000.000
2	Pencetakan buku kuarto berwarna, setebal 100 halaman, dengan paket :		
	a. 250 buku	per paket	34.000.000
	b. 500 buku	per paket	38.000.000
	c. 1000 buku	per paket	50.000.000
3	Pencetakan buku folio hitam putih, setebal 100 halaman, dengan paket :		
	a. 250 buku	per paket	5.500.000
	b. 500 buku	per paket	8.500.000
	c. 1000 buku	per paket	15.000.000

4

LAMPIRAN SURAT EDARAN
MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : **SE/21/W/2009**
TANGGAL **10 JUNI 2009**

1	2	3	4
4.	Pencetakan buku folio berwarna, setebal 100 halaman, dengan paket :		
	a. 250 buku	per paket	35.000.000
	b. 500 buku	per paket	43.000.000
	c. 1000 buku	per paket	58.000.000
5.	Pencetakan pamflet dengan paket, setebal 100 halaman :		
	a. Hitam Putih	per paket	1.000.000
	b. Berwarna	per paket	6.000.000



